

BAB V

KESIMPULAN

Luasnya bangsa Indonesia menjadikan beragam keuntungan maupun kekurangan yang di hadapi oleh pemerintah beserta masyarakat. Masalah angka gizi bayi dan anak dalam upaya ketahanan pangan adalah topik pembahasan pada penulisan ini, merupakan suatu kendala yang di hadapi oleh pemerintah. Seperti yang di jelaskan pada pembahasan sebelumnya ketahanan pangan tidak dapat di capai apabila angka gizi bayi dan anak tidak dapat terpenuhi. Berbagai upaya pemerintah dalam meningkatkan angka gizi bayi dan anak diperoleh melalui hasil Riset Kesehatan Dasar atau Riskesdas, tetapi upaya tersebut dapat di katakan kurang berhasil di karenakan pemerataan yang kurang. Wilayah Nusa Tenggara Timur termasuk daerah dengan gizi bayi dan anak terendah dari seluruh wilayah di Indonesia.

Maka peran PLAN Indonesia sebagai NGO Internasional yang bergerak dalam bidang bantuan kemanusiaan yang terutama terfokus pada perlindungan anak menjadi alat bantu pemerintah untuk menciptakan penurunan angka gizi bayi dan anak. Wilayah Nusa Tenggara Timur bukan merupakan salah satu wilayah yang asing bagi PLAN Indonesia, terutama wilayah Kabupaten Sikka dan sekitarnya. Sejak tahun 1999 PLAN Indonesia telah beroperasi di wilayah Sikka dalam membantu berbagai macam isu yang ada sesuai dengan visi dan misi mereka. Selain itu, faktor sejarah, pengalaman, dan hasil pencapaian yang telah di

lakukan oleh PLAN menjadikan aktor yang berguna dalam membantu kegiatan yang diinginkan oleh pemerintah.

Kegiatan yang digunakan oleh PLAN di Sikka yaitu Pemberian Makan Bayi dan Anak yang di mulai tahun 2013 sampai dengan Juni 2016. Dalam mencapai *goal* kegiatan PLAN Indonesia, mereka juga mengajak beberapa aktor – aktor terkait untuk ikut serta dalam upaya pemberantasan gizi buruk bayi dan anak. PLAN menggunakan pendekatan yang sesuai dengan teori Jejaring atau Transnational Advocacy Network yang disampaikan oleh Margaret E. Keck dan Kathryn Sinkkink. Berikut beberapa pendekatan yang digunakan oleh PLAN berdasar Teori Transasional Advocacy Network ;

Pertama, *information politics* yaitu pengumpulan dan mobilisasi informasi. Dalam isu malnutrition yang berada di wilayah Sikka, PLAN Indonesia melakukan survey dalam menggali informasi dan data yang di tujukan sebagai tolak ukur atau pembuktian fakta yang ada dalam lapangan. Dari pengumpulan informasi dan data tersebut, PLAN mampu menyampaikan serta menunjukkan keadaan angka gizi bayi dan anak pada masyarakat Sikka. Sehingga mampu meningkatkan kepedulian mereka, khususnya bagi Ibu beserta keluarga bayi dan anak.

Kedua, *symbolic politics* yaitu mengenai penggunaan simbol, aksi, atau cerita untuk menaikkan isu terkait. Setelah informasi terkumpul terkait kondisi malnutrisi di kabupaten Sikka, PLAN Internasional Indonesia melakukan kegiatan Pemberian Makan Bayi dan Anak (PMBA) dan Kesehatan Seksual Remaja. Sasaran dari kegiatan tersebut ditujukan untuk bayi, anak, remaja, dan orang tua.

Tujuannya adalah untuk meningkatkan kondisi gizi dan nutrisi bayi dan anak, serta mengedukasi orang tua serta remaja bagaimana cara merawat dan memberikan asupan gizi yang seimbang dan lain sebagainya. Sehingga dengan adanya kegiatan tersebut dapat berdampak bagi masyarakat Sikka terkait masalah malnutrisi yang mereka alami.

Ketiga, *Leverage politics* adalah adanya keterlibatan aktor yang kuat agar terciptanya suatu perubahan. PLAN mengajak stakeholder terkait, seperti pemerintah kabupaten Sikka, Dinas Kesehatan tingkat kabupaten sampai desa di Sikka, Pokjnal Posyandu dari tingkat desa sampai kabupaten, Persagi, dan IBI. Tanpa adanya bantuan tersebut, PLAN tidak dapat mencapai hasil yang maksimal seperti yang sudah diraih saat ini.

Keempat, *Accountability politics* yang dimaksudkan adalah adanya upaya untuk menanamkan pemahaman yang sesuai dengan kebijakan tertentu secara formal kepada para aktor yang kuat. Setelah kegiatan PLAN berakhir, pemerintah Kabupaten Sikka menerapkan metode atau pendekatan sama seperti yang telah digunakan oleh PLAN dalam menangani masalah malnutrisi dan kesehatan reproduksi remaja. Pada awalnya penerapan kegiatan tersebut hanya berada di 15 desa, tetapi oleh pemerintah diimplementasikan ke 14 desa lain. Selain itu dalam Anggaran Dana Desa telah ada kebijakan baru bahwa kegiatan PMBA dan Kesehatan Remaja telah masuk di dalamnya.

Dengan berakhirnya kegiatan PMBA dan Kesehatan Reproduksi dan Seksual PLAN Indonesia di kabupaten Sikka, menjadikan tanda bahwa kegiatan yang dilakukan oleh PLAN memiliki dampak positif bagi pemerintah dan

khususnya masyarakat. Diharapkan kegiatan tersebut tetap berjalan kedepannya sehingga menjadikan kabupaten Sikka sebagai wilayah Anak bergizi cukup dan bergizi seimbang.